



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR**



Nomor SOP : 331 Tahun 2023

Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 05 Januari 2023

Disahkan Oleh :

NAMA SOP : SOP PENGALUAN IS-BELANJA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan Minimal D3
2. Dapat mengoperasikan komputer Ms. Office

KETERKAITAN

1. KPPN
2. Dokumen Pengajuan Tagihan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Dokumen berupa berkas pengajuan tagihan
2. Lembar checklist PPK PPSPM dan Bendahara, Kuitansi, Aplikasi SAKTI Modul Pembayaran

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksana anggaran tidak berjalan efektif

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SPP, SPM, SP2D, LRA

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	Output
		PPK	PSSPM	Staf Pengelola	KPPN			
1.	PPK mengajukan berkas penagihan	Ya		Ya		1. Nota Dinas yang telah di setujui oleh KPA 2. Lembar SpBy, lembar checklist, Kuitansi 3. Faktur Pajak, SSP 4. BAP, BAST, Surat Pesanan, Surat Penawaran, dan Kelengkapan Kontrak Lainnya	Berkas Pengajuan Tagihan	
2.	Menerima dan memverifikasi tagihan		Ya	Ya		1. Catatan Penerimaan terkait kekurangan bukti pertanggung jawaban pada lembar checklist 2. Kuitansi, SSP, Faktur Pajak, Kelengkapan Kontrak serta pertanggungjawaban lainnya Pembebanan Anggaran Sesuai dengan BAS	Analisa tagihan yang dituangkan pada lembar checklist	
3.	Melakukan kesesuaian pembebanan	Ya	Ya				Kesesuaian Pembebanan Anggaran	
4.	Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) melalui Modul Pembayaran Aplikasi Sakti kemudian divalidasi serta OTP oleh PPK	Ya			Ya	Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta bukti pertanggungjawaban	Surat Perintah Pembayaran (SPP)	
5.	Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI kemudian divalidasi serta OTP oleh PSSPM		Ya		Ya	Surat Perintah Membayar (SPM) beserta bukti pertanggungjawaban	Surat Perintah Membayar (SPM)	
6.	Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				Ya	SP2D	SP2D di Omspan	